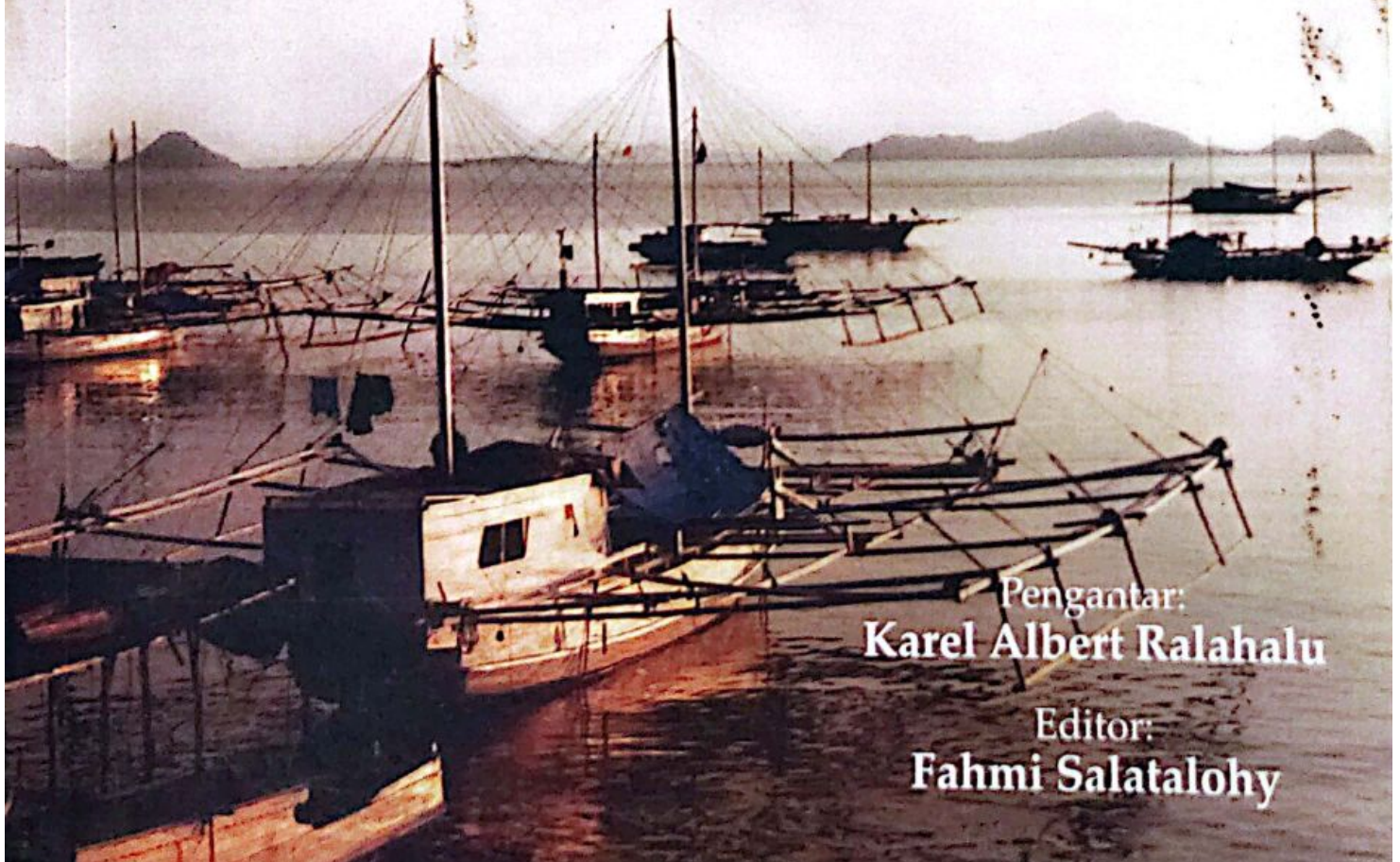


OTONOMI KHUSUS BIDANG KELAUTAN

Suatu Pendekatan Multiaspek Perencanaan,
dan Penganggaran Pembangunan di Maluku



Pengantar:
Karel Albert Ralahalu

Editor:
Fahmi Salatalohy

Darul Kutni Tuhepaly

OTONOMI KHUSUS BIDANG KELAUTAN

**Suatu Pendekatan Multiaspek Perencanaan,
dan Penganggaran Pembangunan di Maluku**

Kata Pengantar : Karel Albert Ralahalu
Editor : Fahmi Salatalohy



OTONOMI KHUSUS BIDANG KELAUTAN

Suatu Pendekatan Multiaspek Perencanaan,
dan Penganggaran Pembangunan di Maluku

Penulis: **Darul Kutni Tuhepaly**

Editor: **Fahmi Salatalohy**

Penata Sampul: **Teguh Prastowo**

Penata Letak: **Sri Kuncara**

Foto Cover Depan: **Lachlyn Soper © 2002**

Hak cipta dilindungi undang-undang
Cetakan I, Februari 2006

Penerbit: Galangpress (Anggota IKAPI)
Jln. Anggrek 3/34 Baciro Baru Yogyakarta 55225
Telp. (0274) 554985, 554986; Faks. (0274) 554985

E-mail: glgpress@indosat.net.id
www.galangpress.com

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam
Terbitan (KDT)

Tuhepaly, Darul Kutni

Otonomi Khusus Bidang Kelautan;

Penerbit: Galangpress, Yogyakarta; cet. I,
Februari 2006, 150 x 210 mm; xx, 232
halaman

ISBN: 979-24-9909-1

1. Sosial Politik

I. Judul

2. Fahmi Salatalohy

Dicetak oleh: Percetakan Galangpress
Jln. Anggrek 3/34 Baciro Baru Yogyakarta 55225
Telp. (0274) 554985, 554986; Faks. (0274) 554985

PENGANTAR EDITOR

Kajian dan gagasan yang dituangkan dalam buku ini merupakan sebuah kreasi yang inovatif. Tulisan-tulisan ini diproses dengan teliti dan disajikan dalam bentuk asli (*indigenous*) dan apik, masalah yang diangkat menampilkan ciri khasnya tersendiri. Tujuannya untuk menambah beberapa gagasan pokok yang berkaitan dengan paradigma baru otonomi daerah, yaitu Otonomi Khusus Bidang Kelautan, Suatu Pendekatan Multiaspek, Perencanaan, dan Penganggaran Pembangunan di Maluku.

Pemilihan tema baru berdasarkan alasan penulis pada sinyalemen pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penulis telah mengasah kepekaan kita terhadap berbagai jenis kekayaan Maluku yang telah dikuras sejak republik ini lahir.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, yang memposisikan masyarakat Maluku sebagai komunitas marjinal dalam pembangunan nasional, mengharuskan kita berpikir untuk menemukan solusi bagi keberlangsungan proses pembangunan di Maluku.

Otonomi Bidang Kelautan, adalah satu dari sekian gagasan yang perlu dipertahankan. Meskipun tidak semudah membalik telapak tangan. Otonomi ini dapat terlaksana, jika seluruh komponen masyarakat dan pemerintah saling mendukung untuk mewujudkannya.

Optimalisasi pembangunan di bidang kelautan perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mengantisipasi sisi negatif otonomi daerah yang terfokus pada

pengembangan bidang politik dan pemetaan wilayah yang dilakukan secara serampangan.

Sinyalemen tentang kekayaan wilayah Maluku selama ini tidak sepadan dengan aspek penerimaan "devisa daerah" dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Regulasi fungsi otonomi daerah yang dilakukan pemerintah pusat mirip dengan sistem "penjatahan" dengan prosentase distribusi hasil kekayaan yang tidak bisa dikorting atau bila perlu ditambah. Tentunya dirasakan tidak berimbang dan tidak adil.

Kondisi inilah yang memungkinkan pentingnya penerimaan (*akseptabilitas*) unsur-unsur pembangunan di bidang kelautan untuk meningkatkan kapital daerah demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Buku ini terdiri dari empat bagian dengan muatan dan objek kajian yang berbeda. Bagian pertama, memberikan tantangan dan beragam alternatif terhadap pentingnya Otonomi Khusus Bidang Kelautan atau menjadikan Maluku sebagai daerah yang berbasis pada prioritas pembangunan bidang kelautan.

Pembangunan dari laut adalah konteks alternatif yang ditawarkan penulis dalam membangun Maluku. Walaupun bidang-bidang lain mempunyai andil dalam menopang pertumbuhan ekonomi saat ini. Model otonomi yang ditawarkan tentunya melalui proses yang selektif dan bersifat koordinatif, karena konsep otonomi di bidang kelautan tidak terlepas dari suatu sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan di Maluku.

Melalui sistem penataan sarana dan prasarana, peningkatan sumber daya manusia, intensifikasi dan diversifikasi kekayaan alam, penulis menantang kita dengan pertanyaan yang simpel dan strategis, Otonomi Khusus, Kenapa Maluku Tidak?

Bagian kedua menyangkut dengan pembangunan yang tumbuh dengan multiaspek. Untuk menetralsir peluang negatif pembangunan perlunya penataan dan perencanaan penganggaran untuk menghindari relasi dominatif dalam proses pembangunan itu sendiri.

Menata pola perencanaan pembangunan sangatlah urgen dan mendesak, karena dikhawatirkan keinginan untuk menjadikan Maluku sebagai daerah otonomi tidak mencapai target yang maksimal, karena kita diperhadapkan pada problem internal pembangunan yang tumpang tindih (*over system*).

Pengelolaan proyek pembangunan selama ini tidak berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Masyarakat dijadikan sekedar subjek pembangunan, sehingga variabel untuk membangun Maluku sangatlah kompleks. Program pengembangan wilayah yang tidak sesuai dengan rencana strategis, mengakibatkan pembangunan berjalan tidak maksimal.

Kompleksitas pembangunan terlihat pada beberapa sektor yang saling mendominasi, perikanan dengan kehutanan, kebutuhan besarnya anggaran dan minimnya investor, ditambah dengan kurang transparannya proses audit keuangan setiap proyek APBD, menimbulkan stimulasi dua arah dalam kebijakan pembangunan di Maluku.

Bagian ketiga, menitikberatkan pada problem kasuistik yang terjadi di Maluku. Menciptakan pembangunan yang bersifat holistik tidaklah mudah jika masih ada kategori-kategori seperti kemiskinan, pengangguran, pengungsi dan korupsi. Kemiskinan yang menjangar berbagai wilayah di Maluku adalah bom waktu jika tidak diantisipasi akan melahirkan segudang problem mendasar lain yang lebih kompleks.

Pemanfaatan anggaran pembangunan untuk orang-orang miskin, tentunya didistribusikan tepat sasaran, untuk menghindari spekulasi dan menyelamatkan masyarakat dari himpitan kemiskinan. Pengungsi adalah variabel yang sangat inheren, diprioritaskan, ditanggung oleh pemerintah agar mereka menikmati rasa aman, sehingga kita dapat mendengar pengakuan mereka terhadap peluang yang lebih besar untuk mencapai cita-cita otonomi khusus di bidang kelautan.

Persoalan kemiskinan dan pengungsi pun sering dipreteli oleh sikap konsumerisme dan ingin menang sendiri oknum pejabat di

Maluku yang dijangkiti virus korupsi, menginginkan anggaran pembangunan dikelola lewat sistem "satu tangan atau "satu atap" hal ini menciptakan resistensi dan mulusnya korupsi di Maluku.

Korupsi, yang telah bermetamorfosis dan akut, menjalar ke berbagai instansi pemerintahan, menyisahkan kepiiluannya sendiri. Uang rakyat miskin dikorup, uang pengungsi ditilap, pejabat tukang korup "cuci tangan", bebas dari hukuman, dan tidak ada upaya hukum yang lebih maksimal untuk memberantas perilaku korup.

Inilah problem pembangunan di Maluku saat ini. Persoalan otonomi khusus di bidang kelautan menjadi sangat problematis, jika kategori di atas tidak segera di berantas.

Kategori pembangunan itu, menjadi kajian kritis penulis untuk melihat sejauhmana kemampuan pemerintah berada pada titik awal percepatan (*akselerasi*) pembangunan, tentunya masyarakat perlu *mensupport* pemerintah agar cita-cita mulia itu terlaksana.

Kondisi lain saat ini yang sangat berpengaruh adalah persoalan suksesi, tentunya menimbulkan segregasi dalam konteks politik lokal. Jika kondisi politik tidak segera dianulir, dikhawatirkan peluang konflik akan tercipta, dan mendera kehidupan masyarakat.

Bagian ke empat, menunjukkan bahwa selama ini penulis adalah orang yang sangat peka terhadap problem sosial kemasyarakatan. Suara-suara kritis penulis sangat datar, menukik, dan mendesak untuk segera diselesaikan. Persoalan pengelolaan BUMD di Maluku menjadi syarat mutlak, agar pemerintah memperhatikan aset-aset daerah yang dikelola selama ini, tetapi tidak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Peningkatan profesionalisme kinerja aparat birokrasi, dan segudang problem yang menghantui wibawa pemerintah, menurut penulis belum tuntas sampai sekarang. Secara eksplisit problem pembangunan di Maluku dikemas dalam wawancara, baik media nasional dan lokal. Hal ini memberikan apresiasi baru,

kritiknya berbobot, peran politisnya menghujam semua aras, dipertaruhkan untuk masyarakat Maluku.

Kasus-kasus politik dan hukum yang terjadi beberapa tahun silam dipublikasikan dalam rangka menggugat naluri politisi agar lebih aktif bicara, mengkritik, dan menunjukkan kepopulerannya sebagai sosok yang menerima amanat *vis a vis* membela kepentingan rakyat.

Wawancara yang disajikan, bukan mengulangi kebekuan masa lalu, tetapi untuk mengorek kepekaan kita bahwa kasus-kasus yang menyelubungi akal sehat berlalu begitu saja tanpa suatu proses pertanggungjawaban (*akuntabilitas*), terhadap publik di Maluku.

Yogyakarta, Januari 2006

Editor

Fahmi Salatalohy